

EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Choirul Anam
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN
Jl. Airlangga No. 3 Sukodadi - Lamongan
Email : choirul.anam19@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan global yang tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Lamongan. Oleh karenanya dalam menangani permasalahan kemiskinan diperlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dari berbagai sektor/dinas di Kabupaten Lamongan. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Lamongan juga perlu melakukan sinkronisasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang lain, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS pada tahun 2010 tercatat 18,70 persen, angka tersebut terus mengalami penurunan hingga di angka 15,18 persen pada tahun 2015. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih di atas Provinsi Jawa Timur sebesar 12,28 persen, sehingga permasalahan kemiskinan perlu mendapat perhatian. Penanggulangan kemiskinan (angka kemiskinan) pada saat ini berkisar 15 persen diharapkan tahun 2021 dibawah 10 persen.

Penanganan pengentasan kemiskinan tersebut tentunya melalui konsep dan penanganan dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat didalamnya, termasuk didalamnya pemberdayaan perempuan. Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara berimbang. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan, antara lain dengan mengembangkan kewirausahaan keluarga sehingga dapat terwujud peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga demi mencapai kesejahteraan keluarga.

Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pemberdayaan perempuan dalam pengentasan

kemiskinan di kabupaten Lamongan, maka perlu dilakukan penelitian perkembangannya.

II. METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden (Fatayat, Muslimat, PKK, Aisyah, Karang Taruna).
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait dengan penelitian ini (Lamongan dalam angka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan).

2.3 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara:

1. Wawancara, yaitu bertanya langsung dengan nara sumber.
2. Kuesiner pada beberapa responden
3. Observasi, mengadakan penelitian secara langsung terhadap tempat yang dituju.
4. Studi Kepustakaan/Literature, yaitu mengumpulkan buku-buku yang ada kaitannya dengan apa yang penulis bahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

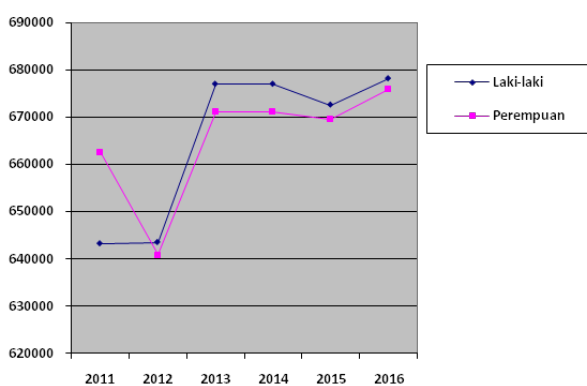
Kabupaten Lamongan memiliki luas 1.812,80 km² atau setara dengan 181.280 Ha. Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 60 51'6" LS sampai dengan 70 23' 6" LS dan terletak antara 1220 4' 4" BT sampai dengan 1220 33' 12" BT. Secara administratif Kabupaten Lamongan

tempat berbatasan dengan : a) Sebelah Timur : Kabupaten Gresik; b) Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban; c) Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto; d) Sebelah Utara: Laut Jawa

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian Wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri atas dataran rendah berawan dengan ketinggian 0 – 20 m dengan luas 50,17 % dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25 – 100 m seluas 45,68 % dan sisanya 4,15 % merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m. Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 Kecamatan, dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak 474, terdiri dari 462 desa dan 12 Kelurahan. Jumlah Dusun sebanyak 1.468 dan Rukun Tetangga sebanyak 6.843 RT.

2. Perkembangan jumlah penduduk perempuan

Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan mulai tahun 2011 sampai tahun 2016 bersifat fluktuatif, yaitu antara 640.850 orang pada tahun 2012 sampai dengan 675.923 orang pada tahun 2016. Jumlah tersebut hampir sama atau sedikit dibawah dengan jumlah penduduk laki-laki, yaitu mempunyai rata-rata prosentase 49,9 %. Penduduk perempuan cenderung mengalami kenaikan, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2012 dan 2015. Untuk lebih jelasnya seperti gambar berikut ini.



Perkembangan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki

3. Perkembangan pencari kerja perempuan pada tahun 2016

Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin pada tahun 2016 sebanyak 1.892

orang yang terdiri dari 1.119 orang perempuan dan 773 orang laki-laki.

Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja perempuan yaitu 1.119 orang lebih banyak dari pada pencari kerja laki-laki sebesar 773 orang. Pencari kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah yaitu tamat SD dan SMP serta pencari kerja tamat D-3 dan S-1, menunjukkan jumlah orang pencari kerja perempuan yang lebih tinggi dari pada jumlah laki-laki (Gambar 1). Sedangkan prosentase pencari kerja perempuan dengan tamat SD dan SMP menunjukkan jumlah yang paling tinggi dengan nilai 38,6 % (431 orang), selanjutnya diikuti pencari kerja perempuan dengan tingkat pendidikan tamat SMA dan SMK yaitu sebesar 36,4 % (401 orang) (Gambar 1a). Hal ini menunjukkan perlu dilakukan pemberdayaan perempuan secara efektif agar bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan tidak bergantung dengan pihak lain. Untuk lebih jelasnya seperti gambar berikut ini.

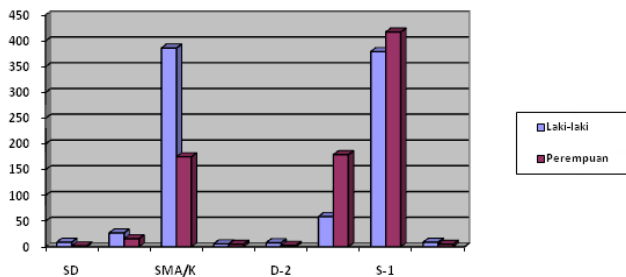
Sedangkan pada tahun 2015 jumlah pencari kerja perempuan yaitu 672 orang lebih rendah dari pada pencari kerja laki-laki sebesar 834 orang, akan tetapi pencari kerja perempuan dengan pendidikan tamat diploma D-3 menunjukkan jumlah yang lebih banyak yaitu 203 orang dari pada laki-laki yaitu 53 orang (Gambar 3).

Pencari kerja perempuan dengan tingkat pendidikan tamat sarjana S-1 dan S-2 menunjukkan prosentase yang paling tinggi yaitu 43,1 % (290 orang), selanjutnya diikuti pencari kerja perempuan dengan tingkat pendidikan tamat diploma yaitu 31,5 % (212 orang). Untuk lebih jelasnya seperti pada Gambar 3a. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan pemberdayaan perempuan secara efektif agar bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan tidak bergantung dengan pihak lain.

4. Perkembangan pencari kerja perempuan pada tahun 2014

pada tahun 2014, jumlah pencari kerja perempuan yaitu 802 orang lebih rendah dari pada pencari kerja laki-laki sebesar 883 orang, akan tetapi pencari kerja perempuan dengan pendidikan tamat diploma D-3 menunjukkan jumlah yang lebih banyak yaitu 179 orang dari pada laki-laki yaitu 59 orang serta yang tamat sarjana S-1 juga lebih banyak yaitu 417 orang perempuan dari pada laki-laki yaitu 379 orang.

Pencari kerja perempuan dengan tingkat pendidikan tamat sarjana S-1 dan S-2 menunjukkan prosentase yang paling tinggi yaitu 52,5 % (422 orang), selanjutnya diikuti pencari kerja perempuan dengan tingkat pendidikan tamat diploma yaitu 23,4 % (187 orang). Untuk lebih jelasnya seperti pada Gambar 4a.. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan pemberdayaan perempuan secara efektif agar bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan tidak bergantung dengan pihak lain. Untuk lebih jelasnya seperti gambar berikut ini.



Pencari kerja menurut tingkat pendidikan terakhir pada tahun 2014.

Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin pada tahun 2016 sebanyak 1.908 orang yang terdiri dari 1.045 orang perempuan dan 863 orang laki-laki.

5. Perkembangan Keluarga Sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan dalam keluarga sejahtera dalam PP No. 21 Th 1994, pasal 2: pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Tujuannya yaitu mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya.

Jumlah keluarga dalam tahapan keluarga sejahtera menunjukkan pra sejahtera mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan setiap tahun atau kemiskinan berkurang. Tahun 2011, jumlahnya 133.759 keluarga, tahun 2012 menjadi 126.825 keluarga, tahun 2013 sebesar 124.089 keluarga pra-sejahtera dan tahun 2014, 2015 turun sebesar 116.769 keluarga pra sejahtera. Sedangkan keluarga sejahtera II, III dan III+ menunjukkan jumlah yang semakin banyak. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah Lamongan telah berhasil dalam pengentasan kemiskinan.

6. Pelaksanaan Kebijakan Pemda Lamongan

Kebijakan Pemda Lamongan ditetapkan dengan visi Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui lima misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik;
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

7. Program Kerja dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan desa yang mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Disamping itu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

tempat Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Seksi partisipasi dan peran perempuan di pedesaan kepada kepala bidang partisipasi dan sosial budaya masyarakat desa, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan program kegiatan bidang partisipasi dan peran perempuan di pedesaan;
2. Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan peran perempuan di pedesaan;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan perempuan; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Upaya Penurunan Kemiskinan Kabupaten Lamongan

Keseriusan untuk menurunkan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dengan ketuanya Wakil Bupati Lamongan dan landasan hukumnya yaitu SK Bupati Lamongan Nomor : 188/108/Kep/413.013/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab. Lamongan.

Adapun Tugas dan Fungsi TKPKD Kab. Lamongan, sebagai berikut : Tugas kesatu adalah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten, dengan fungsi : a) pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten di Bidang Penanggulangan Kemiskinan; b) Pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); d) Pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja SKPD; dan e) Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan

dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Tugas kedua yaitu mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten, dengan fungsi : a) Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; b) Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi : realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; c) Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik; d) Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; e) Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan f) Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Lamongan dan TKPK Provinsi.

9. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lamongan yang telah dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Setiap instansi memiliki rencana strategis yang merupakan bentuk rencana kegiatan yang terukur;
2. Setiap instansi telah melakukan kegiatan yang diprogramkan dalam rencana strategis;
3. Setiap instansi telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kerja dan bantuan alat-alat kerja;
4. Pelatihan dilakukan secara terencana dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan di kabupaten Lamongan, ada beberapa indikator kinerja antara lain :

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Nilai IPG merupakan rasio antara capaian pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki, ketika mendekati 100 maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai IPG pada tahun 2015 yaitu 87,57 % dan meningkat pada tahun 2016 yaitu 88,19 %. Hal ini menunjukkan pembangunan pemberdayaan antara perempuan dan laki-laki semakin merata atau seimbang.

b. Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)

Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan.

c. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan diperoleh dari Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan dibagi jumlah perempuan di kabupaten Lamongan dan hasilnya dikalikan 100 persen.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan kabupaten Lamongan semakin meningkat rata-rata 0,05% setiap tahunnya, yaitu tahun 2015 sebesar 5,04% dan tahun 2016 sebesar 5,09%. Hal ini berarti tingkat keberdayaan perempuan semakin efektif dan akan meningkatkan IPM perempuan. Bentuk kegiatan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan antara lain progra peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, kegiatan pembinaan organisasi perempuan, kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan, dan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan diperoleh dengan membagi antara jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan setia tahun dengan jumlah pengaduan kasus kekerasan pada perempuan dikalikan 100 %.

kualitas hidup dan perlindungan perempuan di kabupaten Lamongan semakin meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 6% dan pada tahun 2016 sebesar 10% serta tahun 2017 sebesar 15%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 4% dan 5%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan semakin baik. Untuk itu efektifitas kesejahteraan perempuan juga semakin meningkat. Pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan rata-rata 5% setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021. Bentuk kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan yang pernah dilakukan antara lain : program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, kegiatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan Gender (KKG), kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan, kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG, kegiatan fasilitasi pengembangan pusat terpadu pemberdayaan perempuan P2Tp2A, kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak, kegiatan sosialisasi peningkatan peran perempuan dan pengambilan keputusan.

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 mempunyai kegiatan yaitu Pembinaan dan pemberdayaan perempuan kabupaten Lamongan, yang diikuti oleh 40 orang dari Fatayat NU dan Aisiyah. Kegiatan tersebut berupa Pelatihan menjahit selama 30 hari dan Pelatihan rias penganten selama 36 hari bertempat di Ruang pertemuan dinas PMD kabupaten. Lamongan, dengan metode teori pembelajaran, praktek langsung dengan media dan peralatan, tanya Jawab, diskusi dan peragaan. Di dalam kegiatan pelatihan menjahit

diberikan 1 (satu) paket peralatan meja dan mesin jahit dan kegiatan pelatihan rias pengantin diberikan 1 (satu) paket peralatan make up. Kegiatan tersebut menyimpulkan bahwa peserta memahami tentang usaha kecil dan tehnik-tehnik mengembangkannya agar menjadi usaha yang kuat dan terjamin kelangsungan hidupnya, peserta dapat mengembangkan kemampuan dalam usaha secara mandiri, serta tingkatkan terus kualitas pengetahuan dan ketrampilan.

12. Hasil Kuesioner

Dalam pembahasan tentang kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bentuk Focus Group Discussion yang dilakukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, peneliti berusaha mengajukan data-data hasil kuisisioner/ angket yang dilakukan oleh tim peneliti sebanyak 20 responden yang telah mendapatkan kegiatan pelatihan pada tahun 2016. Kuisisioner tersebut menyangkut respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Lamongan. Angket ini terdiri dari 5 tipe pertanyaan yaitu tipe pertama tentang pemahaman program pelatihan, tipe kedua tentang program bantuan peralatan, tipe ketiga tentang waktu pelaksanaan, tipe keempat tentang narasumber/pelatih/pemateri dan tipe kelima tentang materi atau tema pelatihan. Setiap pertanyaan disediakan 5 pilihan jawaban (a) yaitu sangat setuju, (b) yaitu setuju, (c) yaitu ragu-ragu, (d) yaitu tidak setuju dan (e) yaitu sangat tidak setuju. Responden berhak menjawab sesuai dengan apa yang dialami, diamati dan dirasakan. Dari angket tersebut dapat diketahui hal-hal :

1. Pemahaman Program pelatihan.
 - a. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang pemahaman program pelatihan yang diikutinya.
 - b. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang program pelatihan itu sudah tepat sasaran.
2. Program Bantuan Peralatan.
 - a. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang bantuan peralatan dari instansi terkait sangat bermanfaat bagi saudara. Jawaban angket sebagai berikut : 55% responden menjawab sangat bermanfaat; dan 45% responden memilih cukup bermanfaat.
 - b. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang kesesuaian bantuan peralatan dari instansi terkait untuk digunakan usaha. Jawaban angket sebagai berikut : 35% responden menjawab sangat sesuai untuk usaha yang dilakukan; dan 65% responden memilih cukup sesuai untuk usaha.
3. Waktu Pelaksanaan.
 - a. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang ketepatan waktu pelaksanaan program pelatihan. Jawaban angket sebagai berikut : 35% responden menjawab bahwa kegiatan pelatihan itu sudah sangat tepat waktunya; 50% responden memilih menjawab bahwa kegiatan pelatihan itu sudah tepat waktunya dan 15% responden memilih ragu-ragu atau kurang tepat waktunya.
4. Nara Sumber/Pelatih/Pemateri.
 - a. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang kompetensi narasumber/pemateri dengan bidang keahliannya. Jawaban angket sebagai berikut : 55% responden menjawab bahwa narasumber sangat sesuai dengan bidang keahliannya; dan 45% responden memilih menjawab narasumber sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang aplikasi praktek yang diberikan narasumber/pemateri. Jawaban angket sebagai berikut : 55% responden menjawab bahwa narasumber sangat aplikatif pada saat praktek waktu pelatihan; dan 45% responden memilih menjawab narasumber cukup aplikatif pada saat praktek waktu pelatihan.
5. Materi/tema pelatihan.
 - a. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang kesesuaian materi dengan judul program pelatihan. Jawaban angket sebagai berikut : 60% responden menjawab bahwa materi yang diberikan sudah sangat sesuai dengan judul pelatihan; 40% responden memilih menjawab bahwa materi yang diberikan sudah cukup sesuai dengan judul pelatihan.
 - b. Respon pengguna manfaat kegiatan pemberdayaan perempuan tentang pemahaman pemberian materi program pelatihan pada pengguna. Jawaban angket sebagai berikut : 55% responden menjawab bahwa materi yang diberikan sudah sangat faham; 45% responden memilih menjawab bahwa materi yang diberikan sudah cukup faham.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmanto, Priadi, 2008. *Evaluasi Development Goals (MDGs) Indonesia: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*. Tersedia di SRRN : <http://srrn.com/abstract=1996301>, diakses pada 30 Oktober 2017.
- Baiquni, 2006, *Pengelolaan Sumberdaya Perdesaan Dan Strategi Penghidupan Rumahtangga di DIY Masa Krisis (1998- 2003)*, Disertasi, UGM Yogyakarta
- BAPPENAS & Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: BAPPENAS & Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Bappenas, 2008, *Hasil Kajian Pembelajaran dari Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan*
- Basuki, A. & Prasetyo, Y. E. 2007. *Me-Museum-kan Kemiskinan*. Surakarta: PATTIRO Surakarta.
- Dreze, Jean dan Sen, Amartya. *The Amartya Sen and Jean Drèze Omnibus:(comprising) Poverty and Famines; Hunger and Public Action; India: Economic Development and Social Opportunity*. Oxford University Press. 1999.
- Handoko T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, Edisi II, Cetakan ke-14*. Yogyakarta. BPFE
- Hempri Suyatno. 2013. *Evaluasi Pengentasan Kemiskinan sleman*
- Jacobsen Joyce P, 1998. *The Economics of Gender*. Great Britain, TJ International, Padstow, Cornwall: Hongkong
- Kementerian P2 dan PA dengan BPS, 2011. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta
- Lamongan Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
- Lamongan Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
- Lamongan Dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
- Lamongan Dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Megawangi, 1997. *Gender Perspective in Early Childhood Care and Development in Indonesia. Report Submitted to The Consultative Group on Early Childhood Care and Development, M A, USA*.
- Puspitawati dkk. (2012). *Kontribusi Ekonomi dan Peran Ganda Perempuan Serta Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Subyektif*. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Vol. 5, No. 1
- Subejo dan Supriyanto, 2004. *Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dengan Pembangunan Berkelanjutan, Ekstensi, Deptan RI Vol 19/ Th XI/ 2004*
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sukei, K. (1995). *Wanita dalam Perkebunan Rakyat: Hubungan Kekuasaan Pria dan Wanita dalam Perkebunan Tebu: Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.